

## ABSTRAK

Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap pekerja sebagai bentuk jaminan kerja berpotensi merugikan hak-hak pekerja. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban pekerja selama bekerja dalam hukum ketenagakerjaan, menganalisis peran dinas tenaga kerja dalam pengawasan terhadap penahanan dokumen kerja, dan menganalisis upaya perlindungan pekerja terkait dengan kepemilikan dokumen pribadi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis-normatif* dengan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis* dengan menelaah data-data sekunder melalui studi kepustakaan yang diperkuat dengan hasil wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *analisis kualitatif* sehingga memudahkan mengkaji hasil analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penahanan ijazah masih dilakukan oleh perusahaan, meski telah diterbitkannya Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 sebagai larangan penahanan dokumen pribadi, sehingga melanggar hak-hak pekerja seperti hak atas pekerjaan dan hak atas rahasia pribadi. Meskipun demikian, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang telah berperan dalam upaya pengawasan dan perlindungan hukum, seperti perundingan bipartit, konsiliasi, arbitrase, mediasi, dan peradilan hubungan industrial sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pengusaha harus secara konsisten memenuhi hak pekerja dan pekerja perlu memastikan bahwa seluruh ketentuan dalam perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya, jika pengusaha tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian, maka pekerja dapat mengajukan perlindungan hukum. Diperlukan pengaturan secara eksplisit terhadap praktik penahanan ijazah/dokumen dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sehingga dapat memberikan perlindungan atas hak-hak pekerja.

**Kata Kunci: Hak Pekerja, Ketenagakerjaan, Perusahaan, Penahanan Ijazah**

## **ABSTRACT**

*The practice of companies withholding employee diplomas as a form of job security has the potential to harm workers' rights and create inequality in industrial relations. This practice raises legal issues because it is not explicitly regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. This study analyzes the legal regulations related to the withholding of diplomas in the labor system in Indonesia and the forms of legal protection that can be provided to workers.*

*This study uses a legal-normative approach with descriptive analytical research specifications, conducted by analyzing secondary data through literature studies reinforced by interview results with the Semarang City Manpower Office. The data was analyzed using qualitative analysis methods, thereby facilitating the assessment of the analysis results.*

*The results of the study show that the practice of withholding diplomas is still carried out by companies, despite the issuance of Circular Letter Number M/5/HK.04.00/V/2025 prohibiting the withholding of personal documents, thereby violating workers' rights such as the right to freedom of choice of employment and the right to personal documents. Nevertheless, the Semarang City Manpower Office has played a role in monitoring and legal protection efforts, such as bipartite negotiations, conciliation, arbitration, mediation, and industrial relations courts in accordance with Semarang Mayor Regulation Number 100 of 2021 concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions, and Work System of the Semarang City Manpower Office. To overcome this problem, employers must consistently fulfill the rights of workers, and workers need to ensure that all provisions in the agreement are implemented properly. If employers do not fulfill the provisions in the agreement, workers can seek legal protection. Explicit regulations on the practice of withholding diplomas/documents are needed in the new Manpower Law so that workers' rights can be protected.*

***Keywords: Workers' Rights, Employment, Companies, Withholding of Diplomas***